

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



BUKITTINGGI 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustri dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sangat tinggi, yang tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, focus dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan public dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. LKIP DPMPTSPPTK 2020 diharapkan dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi



ISRA YONZA, SH, MH
NIP. 19710719 200212 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMERY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (LKIP DPMPTSPPTK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP DPMPTSPPTK merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKIP juga memuat capaian realisasi keuangan dan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan public kepada masyarakat di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja pada Tahun 2020. Serta memuat mengenai analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kegiatan atau program, analisa efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut: (1). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, target 88% dengan realisasi 79,64% (tingkat capaian 90,5%); (2). Meningkatnya peluang investasi dengan indikator kinerja Persentase peningkatan realisasi investasi, target 7% dengan realisasi 6,1% (tingkat capaian 87,14%); (3). Meningkatnya

kontribusi sektor industri pengolahan dengan indikator Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB, target 5,8% realisasi 5,03% (86,72%) dan (4). Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, target 5% dengan realisasi 6,14% (79%). Secara keseluruhan capaian kinerja beberapa berada pada kategori Tinggi.

Pada Tahun 2020 DPMPTSPPTK juga melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.800.741.002,- (99,42%) dari target sebesar Rp.805.408.600,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.7.474.063.488,- dengan realisasi sebesar Rp.6.195.137.251,57,- (82,89,18%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.13.678.836.617,- dengan realisasi sebesar Rp.13.090.406.361,99 (95,70%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp.20.127.594.854,- dengan realisasi Rp.19.285.543.613,56,- (95,82%). DPMPTSPPTK memiliki 13 (tiga belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran. Secara umum capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan berada pada kategori sangat tinggi bahkan mencapai 100%. Untuk realisasi fisik dan keuangan yang dibawah 100% pada umumnya merupakan bentuk efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan.

LKIP DPMPTSPPTK ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu perindustrian dan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola, penataan system teknologi informasi yang terintegrasi, perbaikan perencanaan yang efektif dan efisien, pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat guna serta peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam berbagai pemecahan permasalahan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	li
DAFTAR ISI	Iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum SKPD	3
1.3. Isu Strategis	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis SKPD	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2019	39
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	59

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	13
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020	15
Tabel 2.4 Target Pendapatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020	20
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2020	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2019 dan Tahun 2020	25
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah Renstra	27
Tabel 3.5 Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020	29
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan dan Belanja DPMPTSPPTK Tahun 2020	35
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020	36

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi dibawah naungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang selanjutnya disebut LKIP DPMPTSPPTK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi maka perlu disusun laporan kinerja yang memuat capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel dalam LKIP DPMPTSPPTK. Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kota Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Capaian kinerja pada penyusunan LKIP DPMPTSPPTK dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada satu tahun anggaran. Capaian kinerja juga diukur dengan membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah\:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah maka disusun LKIP DPMPTSPPTK. Dokumen ini juga merupakan instrumen untuk mengontrol peningkatan kinerja setiap perangkat daerah.

Penyusunan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai target oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2020. Selanjutnya diharapkan juga dapat mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LKIP DPMPTSPPTK juga berguna untuk evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan yang bekersistinambungan dalam meningkatkan kinerja serta dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bagian dari pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi . Adapun ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Pelayanan Perizinan / Non Perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu .
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi

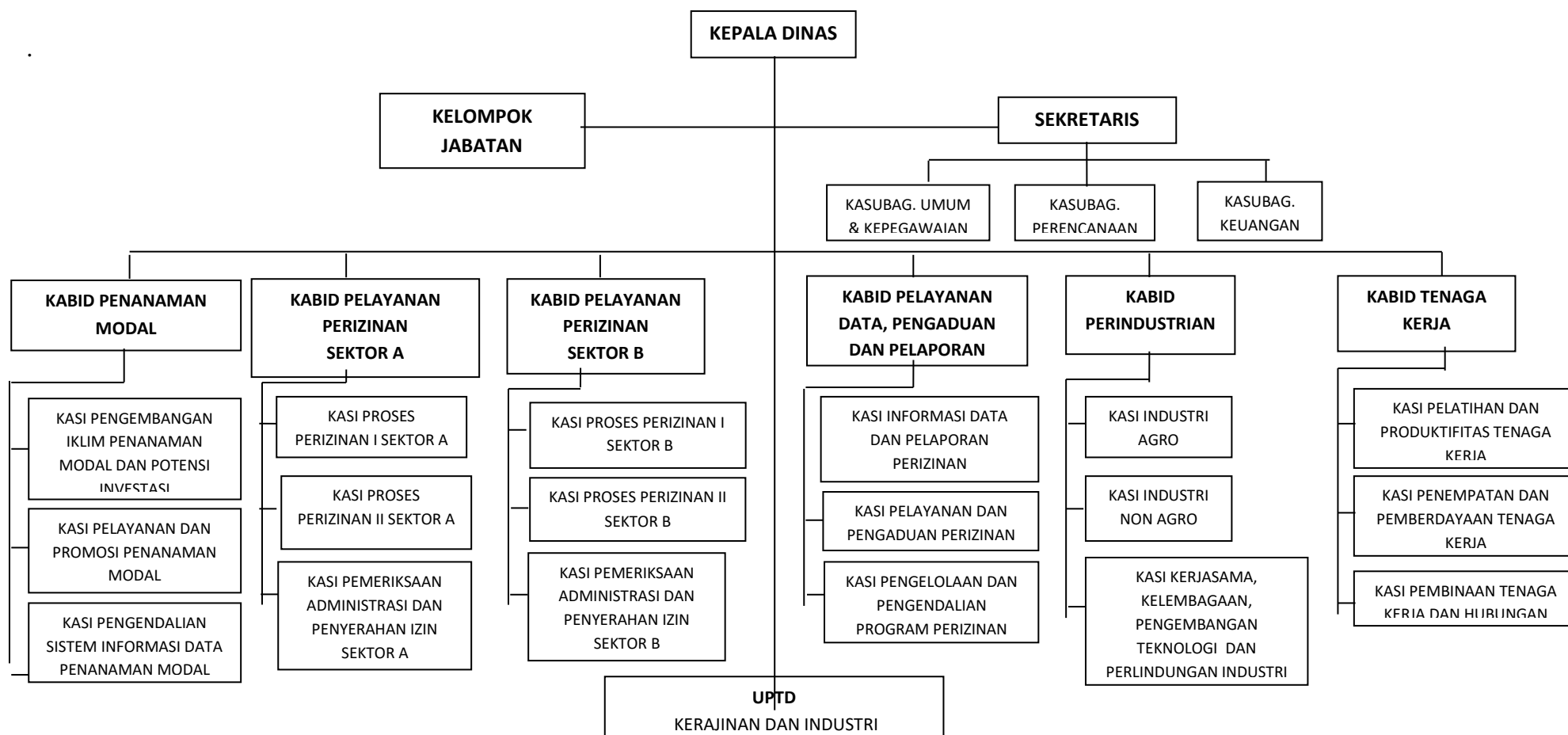
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Kasubag Umum
 2. Kasubag Keuangan
 3. Kasubag Perencanaan
- c. Kabid Penanaman Modal
 1. Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
 2. Kasi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
 3. Kasi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor A
 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor A
 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor A
 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B
 1. Kasi Proses Perizinan I Sektor B
 2. Kasi Proses Perizinan II Sektor B
 3. Kasi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- f. Kabid Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan
 1. Kasi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan
 2. Kasi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
 3. Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Kabid Perindustrian
 1. Kasi Industri Agro
 2. Kasi Industri Non Agro
 3. Kasi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri

- h. Kabid Tenaga Kerja
 - 1. Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2. Kasi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - 3. Kasi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
- i. Ka. UPTD Kerajinan Industri

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



1.3. ISU STRATEGIS SKPD

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSPPTK serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.
2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif. Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date. Serta diharapkan dapat menjadikan teknologi dan informasi yang dikembangkan juga menjadi sarana dalam pelayanan pencari kerja, informasi pasar kerja, informasi produk industry kecil menengah dan informasi bentuk fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga mengharuskan

pemerintah sebagai perantara dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh sehingga kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan azas kesamaan dalam hukum dan azas kesetaraan keadilan.

5. Perubahan struktur pasar dan selera masyarakat terhadap kualitas produk industri kecil menengah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing produk IKM sehingga IKM harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam produk dan strategi bisnis. Fasilitasi dan pembinaan dari DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi juga memegang peranan yang penting dalam mendukung perkembangan Industri Kecil Menengah.
6. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan industri kecil menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
7. Rendahnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Perluasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Disamping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kota Bukittinggi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.
8. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit dll.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab. I PENDAHULUAN

Mengemukakan uraian singkat tentang organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, struktur organisasi secara garis besar dan bagaimana antar bagian bersinergi mencapai sasaran dan tujuan, gambaran tentang apa yang diharapkan masyarakat dan Stakeholder atas keberadaan organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Organisasi, Sasaran, Program, Kegiatan yang ingin dicapai dan indikator serta target dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam anggaran atau anggaran yang tersedia untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi dalam pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menuangkan rencana pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Kemudian pada tingkat perangkat daerah rencana pembangunan jangka menengah ini dijabarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dokumen perencanaan strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bukittinggi pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**, maka dirumuskanlah kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun dalam Renstra DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2016-2021. Misi pada RPJMD yang menaungi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah :

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan
2. Misi 4 yaitu Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih berdaya Guna.

Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, yang memuat

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya nilai investasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peluang investasi
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
4. Meningkatnya kesempatan kerja.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Th Ke						Kondisi Akhir Renstra 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
2	Menurunnya nilai investasi	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	2%	2%	3%	5%	7%	8%	8%
		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5%	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	6%	6%
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,88%	5,84%	5,70%	5,50%	5%	4,93%	4,93%

b. Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu misi 2 “Meningkatkan kinerja pemerintahan secara lebih profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan” dan misi 4 “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna”. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	1.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal, perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu	1.Menyediakan bangunan gedung kantor yang lebih representatif 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal 3.Mengembangkan system informasi perizinan dan tenaga kerja secara online
		2.Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dan perizinan	1. Mengikuti seminar, sosialisasi, bintek dan pelatihan penanaman modal 2. Melakukan koordinasi dan sharing informasi

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			dalam peningkatan pelayanan
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal diberbagai sektor ekonomi	1. Melaksanakan promosi investasi dalam dan luar negeri 2. Meningkatkan kerjasama kelompok usaha besar dengan usaha kecil menengah 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan penanaman modal
		2. Menyediakan data dan informasi penanaman modal yang akurat	1. Menyediakan informasi dan kajian peluang investasi 2. Membuat rencana umum penanaman modal 3. Menyediakan data PMDN dan PMA
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen industri kecil menengah dan produk yang berdaya saing	1. Meningkatkan kemampuan teknologi industri 2. Meningkatkan kapasitas Iptek sistem industri 3. Meningkatkan pelatihan IKM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri yang kompetitif 4. Penataan terhadap struktur industri 5. Fasilitasi bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal dan

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			standarisasi internasional dalam produksi
		2.Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan industry kecil menengah serta kelompok usaha bersama dalam pengembangan sentra industry potensial	1. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif 2. Mengikuti pengembangan sumberdaya aparatur bidang industry
	Meningkatnya kesempatan kerja	1.Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lembaga penegakkan hukum ketenagakerjaan 2. Peningkatan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama 3. Pembinaan pengurus dan anggota serikat pekerja 4. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP mengenai hubungan kerja 5. Pengintegrasian sistem informasi pasar kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan dan pencari kerja 6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaan. 7. Mengikuti pengembangan

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Lebih Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan			
Misi 4 RPJMD : Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan secara Lebih Berdaya Guna			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			sumber daya aparatur bidang tenaga kerja
		2.Melakukan fasilitasi dan pembinaan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja 2.Pengembangan pola pendanaan pelatihan melalui koordinasi, pemerintahan, pemerintah daerah dan lembaga pelatihan swasta

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSPPTK dengan Walikota Bukittinggi. Dalam penyusunannya perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Berikut ini Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5,8%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir). Capaian target pada Perjanjian Kinerja di atas juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2020 mempunyai 13 (tiga belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi
- j. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan jasa pengamanan kantor
- l. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan mebeleur
 - b. Pengadaan peralatan kantor
 - c. Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik)
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan DPMPTSPPTK
5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
6. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah
 - a. Kajian penanaman modal
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Promosi dan gelar potensi investasi
8. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
 - a. Pelayanan perizinan sektor A
 - b. Pelayanan perizinan sektor B
 - c. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - d. Pengelolaan aplikasi perizinan online
 - e. Validasi, dokumentasi dan pelaporan perizinan
 - f. Publikasi media luar ruang pelayanan perizinan
 - g. Pengelolaan dan penyajian informasi data

- h. Pengawasan tempat usaha
- 9. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - a. Pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelatihan tata boga
 - c. Pelatihan instruktur lembaga latihan swasta
 - d. Monev eks. siswa pelatihan
- 10. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
 - a. Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial
 - b. Asistensi dan pembinaan peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- 11. Program peningkatan kesempatan kerja
 - a. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja
- 12. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 - a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
 - b. Pengelolaan UPTD kerajinan industri
 - c. Perkuatan organisasi mitra industri
 - d. Bimbingan teknis standarisasi produk
 - e. Perkuatan asosiasi makanan
- 13. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - a. Pelatihan teknis industri kecil menengah
 - b. Promosi industri kecil menengah
 - c. Penyusunan peraturan daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi
 - d. Pengendalian gugus kendali mutu

b. Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 memiliki target pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 2.4
Target Pendapatan Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD (Rp)	APBD P (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	149.360.000	180.408.600	(46,16)
	Retribusi IMB	850.640.000	725.000.000	(14,77)
	TOTAL PENDAPATAN	1.000.000.000	805.408.600	(19,46)
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	7.474.063.488	6.448.758.237	(13,72)
	Belanja Langsung	15.331.907.054	13.678.836.617	(10,78)
	TOTAL BELANJA	22.805.970.542	20.127.594.854	(11,74)

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2020 memiliki target penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.1.000.000.000,- dan penyesuaian pada perubahan anggaran sebagai dampak Covid-19 menjadi Rp.805.408.600,-.
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2020 memiliki Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 7.474.063.054,- dan mengalami pengurangan sebesar 13,72% menjadi Rp.6.448.758.237,- pada APBD Perubahan.
- Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 15.331.907.054,- mengalami efisiensi sebesar 10,78% menjadi Rp.13.678.836.617,- pada APBD P Tahun 2020.
- Secara keseluruhan total Belanja pada APBD yaitu Rp.22.805.970.542,- menjadi Rp.20.127.594.854,- pada APBD P Tahun 2020.

Pada tahun 2020 DPMPTSPPTK dilaksanakan 13 (tiga belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan internal atau operasional kantor DPMPTSPPTK dan program kegiatan yang mendukung capaian target sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

- a. Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut kelompok belanja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 678.364.471,-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 11.381.412.353,-
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 19.200.000,-
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 3.825.000,-,-

- b. Anggaran yang mendukung sasaran 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Rp. 491.850.103,-

- c. Anggaran yang mendukung sasaran 2 “Meningkatnya peluang investasi” yaitu :

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp. 1.321.250,-
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp. 5.484.150,-
3	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Rp. 7.851.290,-

- d. Anggaran yang mendukung sasaran 3 “Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan” yaitu:

No	Program	Anggaran
----	---------	----------

1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 24.855.446,-
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 348.987.664,-

- e. Anggaran yang mendukung sasaran 4 “Meningkatnya kesempatan kerja” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Rp. 20.131.135,-
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp. 19.850.150,-
3	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 87.273.350,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban kinerja atas target- target kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi dari suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dilakukan berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berikut capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sector industry pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,14%	79%

- a. Hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK pada tahun 2020 yaitu 79,64% dari target yang ditetapkan 88 %. Ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan kinerja unit pelayanan memberikan kinerja baik. Adapun masing-masing ruang lingkup pelayanan yakni persyaratan pelayanan kategori kurang baik; prosedur pelayanan kategori kurang baik; waktu pelayanan pada kategori baik; biaya/tarif pelayanan kategori baik; produk layanan kategori kurang baik; kompetensi pelaksana pelayanan kategori kurang baik; perilaku pelaksana kategori baik; penanganan pengaduan kategori sangat baik dan sarana prasarana kategori baik.

Beberapa kategori yang kurang baik disebabkan DPMPTSPPTK masih beroperasi pada kantor sementara sehingga pelayanan penanaman modal PTSP tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

- b. Pada tahun 2020 capaian persentase peningkatan realisasi investasi sebesar 6,1 persen dengan target yang ditetapkan 7%. Belum tercapainya target ini disebabkan kondisi perekonomian Kota Bukittinggi yang menurun akibat dampak dari Covid-19. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.
- c. Berdasarkan data BPS pada PDRB ADHB Tahun 2020, diperoleh realisasi dari kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 5,03 persen dengan target 5,8 persen. Capaian target ini masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini masih disebabkan oleh kebijakan PSBB dari pemerintah untuk pencegahan Covid-19, sehingga industri pengolahan sebagai salah satu sektor penunjang pariwisata sangat berpengaruh terhadap perkembangan aktifitas usahanya.
- d. Berdasarkan definisi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar 6,14 persen, sedangkan target yang ditetapkan 5%. Dapat dilihat bahwa TPT Kota Bukittinggi masih tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Terbatasnya aktifitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19, memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan yang membatasi usaha dan operasionalnya. Pembatasan operasional ini akan mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap pekerja, sehingga permasalahan-permasalahan hubungan industrial tidak dapat dihindari, seperti pemutusan hubungan kerja.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indicator sasaran untuk tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
DPMPTSPPTK Tahun 2019 dan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2019					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%	79,75%	93%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	5%	6,2%%	124%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5,6%	5,66%	101,1%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,5%	6,59%	88%
2020					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	6,14%	79%

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan setiap tahun pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai bentuk penilaian kinerja dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan

kepada masyarakat. Pada Tahun 2019 IKM Pelayanan Perizinan sebesar 79,75% dan tahun 2020 sebesar 79,64%. Adanya penurunan sebesar 0,11% hal ini dapat disebabkan operasional yang dilakukan pada kantor sementara DPMPTSPPTK karena Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi masih dalam tahapan pembangunan, sehingga sarana prasarana pelayanan belum maksimal. Diharapkan dengan dimulainya operasional MPP Kota Bukittinggi pada tahun 2021 kualitas pelayanan penanaman modal PTSP dapat semakin meningkat.

- b. Persentase peningkatan realisasi investasi juga mengalami peningkatan, untuk tahun 2019 tercapai 5 % dari target 6,2 %. Berbeda dengan tahun 2020 yang ditarget 7 % terealisasi 6,1 %. Kondisi ini disebabkan oleh dampak dari beberapa kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran Covid-19, seperti adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga berkurangnya investor dalam melakukan investasi di Kota Bukittinggi.
- c. Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 yaitu 5,03% dibawah target yaitu 5,8%, dengan tingkat capaian indikator sebesar 86,72%. Tetapi kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ini lebih besar pada tahun 2019 yaitu 5,66% dengan target 5,6% dengan tingkat capai sebesar 101,1%.
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2019 target TPT sebesar 5,5% dan realisasi 6,59% yang masih berada dibawah target. Untuk tahun 2020 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5% dengan realisasi 6,14%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 4616 dengan rincian pengangguran laki-laki 1875 dan perempuan 2741.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 telah memuat target tahunan indikator

kinerja DPMPTSPPTK. Target tahunan indikator kinerja disusun dalam Perjanjian Kinerja tahunan, yang diimplementasikan dalam Renja DPMPTSPPTK yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai target pada tahun berjalan. Berikut dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target akhir pada Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2016-2021 pada table berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2020
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	90%	79,64%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	8%	6,1%
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5,8%	6%	5,03%
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	4,93%	6,14%

- a. Target akhir Renstra untuk Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan tahun 2021 sebesar 90%, jika dibandingkan dengan IKM tahun 2020 yaitu sebesar 79,64%, masih terdapat selisih sebesar 10,36%. Selisih ini menjadi tugas bagi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan jumlah pelayanan perizinan yang dilayani secara online (melalui OSS, Si Cantik dan SIM BG) dan mulai beroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi akan dapat meningkatkan nilai IKM pelayanan perizinan ini sesuai target akhir Renstra.

- b. Persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2020 yang ditarget 7% terealisasi 6,1%. Nilai ini berada dibawah target yang ditetapkan pada akhir Renstra sebesar 8%. Sehingga masih diperlukan promosi penanaman modal dan pembinaan dunia usaha sehingga nilai investasi Kota Bukittinggi terus meningkat.
- c. Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ditarget pada akhir Renstra sebesar 6% artinya diharapkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor ini dapat memberikan kontribusi sebesar 5,03% untuk membentuk PDRB ADHB Kota Bukittinggi yang terdiri atas 17 sektor lapangan usaha. Kontribusi ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitasnya.
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada akhir Renstra tahun 2021 sebesar 4,93%. Sedangkan untuk tahun 2020 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 5% dengan realisasi 6,14%. Jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi yaitu 4616 dengan rincian pengangguran laki-laki 1875 dan perempuan 2741. Realisasi tahun 2020 masih jauh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. DPMPTSPPTK telah mempersiapkan berbagai bentuk pelayanan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja dan pembinaan perusahaan sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Kota Bukittinggi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut

Penyebab keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2020 dengan penyerapan anggaran mencapai 95,82% dengan rincian 82,89% untuk belanja tidak langsung dan 95,70% untuk Belanja Langsung;
- b. Adanya komitmen semua pejabat struktural dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
- c. Tahun 2020 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggunakan aplikasi berada pada kategori Baik;

- d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- e. Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia;
- f. Menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyebab kegagalan:

- a. Ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang masih terbatas secara kuantitas karena ada yang pensiun, mutasi dan promosi dan belum ada gantinya.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware dan soft ware pendukung operasional dan pelayanan.
- c. Adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sehingga tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSPPTK Tahun 2020.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek dan diikuti diklat yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan
- b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Melakukan percepatan dalam penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan lebih maksimal dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang tersedia

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Selama Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- Melakukan cascading kinerja dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2020, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020. Dapat dilihat pada table berikut kegiatan yang dieliminasi sesuai cascading kinerja DPMPTSPPTK :

Tabel 3.5
Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	EFISIENSI	KETERANGAN
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama usaha besar dan UKM	14,060,000	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	EFISIENSI	KETERANGAN
	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	43,886,000	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	68,742,600	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program penataan struktur industri	35,514,850	
	Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir		Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan pelayanan terpadu terhadap masyarakat		
	Pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B	24,705,165	Tidak mendukung capaian kinerja
	Program peningkatan kualiti dan produktivitas tenaga kerja		
	Pelatihan menjahit	73,353,460	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan elektronika	76,652,960	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan memasak	78,395,010	Tidak mendukung capaian kinerja
	Pelatihan salon	82,228,160	Tidak mendukung capaian kinerja
	JUMLAH	497,538,205	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	KEUANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	85,60%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	97,93%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	94,12%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	75%	94,98%
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	75%	78,52%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	KEUANGAN
7	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase dokumen potensi daerah	75%	100%
8	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	100%	92,35%
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian	64%	77,81%
10	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	80%	91,68%
11	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja	75%	80,96%
12	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Penambahan Nilai Penjualan IKM	80%	86,32%
13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha IKM)	100%	98,91%

Dari 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 jika dilihat dari realisasi fisik pada umumnya berada pada kategori sangat baik bahkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan berada dibawah 100%, kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1) Program Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk memenuhi tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran, terdiri atas 12 kegiatan. Sehingga pemenuhan sarana prasana pendukung dapat terlaksana. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.900.304.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.678.364.471,- (75,35%).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pada DPMPTSPPTK terdiri atas 4 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.11.622.385.314,-

dengan realisasi sebesar Rp.11.381.412.353,- dan realisasi mencapai angka 97,93%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur, didukung dengan 1 kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp.20.400.000,- dengan realisasi Rp.19.200.000,- dan tingkat capaian 94,12%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimtek, didukung dengan 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.3.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.825.000,- dan tingkat realisasi 100%.

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi baik PMDN dan PMA ke Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.321.250,- dengan realisasi sebesar Rp.1.321.250,- dan realisasi mencapai angka 100%, didukung dengan 1 kegiatan.

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor yang datang ke Kota Bukittinggi untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha yang didukung dengan 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.5.774.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.484.150,- dan realisasi mencapai angka 94,98%.

7) Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatnya informasi dan data potensi investasi daerah Kota Bukittinggi, terdiri atas 1 kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 7.851.290,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.851.290,- (100%).

8) Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dengan 9 kegiatan, dalam hal ini terkait pelayanan perizinan bidang penanaman modal. Program

ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.532.578.715,- dengan realisasi sebesar Rp.491.850.103,- dan tingkat realisasi mencapai angka 92,35%.

- 9) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini didukung dengan 4 kegiatan setelah dilakukan refocusing menjadi 3 kegiatan. Besaran anggaran untuk program ini sebesar Rp.112.163.750,- dengan realisasi Rp.87.273.350,- tingkat realisasi 77,81%.
- 10) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penempatan pencari kerja di Kota Bukittinggi dan didukung dengan 1 kegiatan. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini Rp.20.688.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.19.850.150,- (95,12%).
- 11) Program Perlindungan Pengembalian Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara pekerja dan pemilik perusahaan. Program ini memiliki 2 kegiatan. Dengan anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.21.957.312,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.20.131.135,- (91,68%).
- 12) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah industri kecil yang berkembang, yang dapat dilihat dari perkembangan unit usahanya. Program ini memiliki 4 kegiatan penunjang, setelah dilakukan refocusing anggaran menjadi 1 kegiatan. Program ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk pembinaan dan fasilitasi terhadap IKM yang ada di Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.25.130.000- dengan realisasi sebesar Rp.24.855.446,- dan realisasi mencapai angka 98,91%.
- 13) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai penjualan industri kecil menengah dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan industri. Program ini memiliki 5

kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.404.277.485,50 dengan realisasi sebesar Rp.348.987.664,- dan tingkat realisasi mencapai angka 86,32%.

b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah materai 3000; jumlah materai 6000; jumlah buku cek; jumlah jasa paket pengiriman	100%	85,60%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon; rekening listrik; rekening air dan pembayaran speedy	100%	43,49%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	100%	77,17%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang diadakan; jumlah petugas kebersihan	100%	98,53%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	97,34%
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	100.00%	89,48%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak; jumlah dokumen yang digandakan; jumlah dokumen yang dijilid	100%	69,59%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	75,25%	64,76%
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	80%%	71,80%
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Persentase pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	95,90%
11	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	100%	85,25%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jml. Tenaga Pengamanan Kantor	100%	99,52%
13	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	100%	95.83%
14	Pengadaan Meubeleur Kantor	Jenis meubeleur yang diadakan	95%	79,42%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DDMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
15	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	100.00%	99.61%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Jml. Gedung yang dipelihara	100%	33,3%
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jml. Pakaian dinas yang diadakan	100%	94,12%
19	Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	92.14%
20	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	100.00%	94,98%
21	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	Jumlah pameran/expo yang diikuti	-	100%
22	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	-
23	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah perizinan sektor B yang diterbitkan	75%	98.03%
24	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah perizinan sektor A yang diterbitkan	90%	92,21%
25	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	65%	95,47%
26	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah perizinan yang dikelola secara online	100.0%	81,13%
27	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	100%	88.80%
28	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	100.00%	89,39%
29	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan perizinan secara online	88.23%	85%
30	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	75,24%	92.50%
31	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan	100%	61%
32	Pelatihan Tata Boga	Jumlah peserta pelatihan tata boga	100%	95,50%
33	Monev Eks Siswa Pelatihan	Laporan monev ex siswa pelatihan	-	82%
34	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	-	88,85%
35	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin	100%	94,81%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Fisik	Keuangan
36	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Laporan asistensi PP dan PKB di perusahaan	100%	87%
37	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja	100%	95,12%
38	Pengembangan dan pelayanan teknologi industry	JUmlah peserta sosialisasi; jumlah IKM yang difasilitasi label halal; Jumlah IKM yang difasilitasi packing	100%	100%
39	Pengelolaan UPTD kerajinan industri	Pelaksanaan penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industry	100%	95,2%
40	Perkuatan organisasi mantra UPTD kerajinan	Organisasi mitra UPTD yang difasilitasi	100%	66%
41	Perkuatan asosiasi makanan	Jumlah asosiasi pangan yang dibina; jumlah pameran pangan yang diikuti	-	-
42	Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah	Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar	-	-
43	Promosi Industri Kecil Menengah	Jumlah pameran yang diikuti IKM	-	-
44	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah dokumen Perda RPIK	100%	98,91%
45	Pendampingan Gugus Kendali Muru	Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu	-	-

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa 45 (empat puluh lima) kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa capaian fisik yang masih kurang 100%. Untuk capaian kinerja keuangan yang kurang 100% pada umumnya merupakan sisa lebih pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 memiliki target dan realisasi pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan
Belanja Pada Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	80.408.600	106.741.628	132,75%
	Retribusi IMB	725.000.000	693.999.274	95,72%
	TOTAL PENDAPATAN	805.408.600	800.741.002	99,42%
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	7.474.063.488	6.195.137.251,57	82,89%
	Belanja Langsung	13.678.836.617	13.090.406.361,99	95,70%
	TOTAL BELANJA	20.127.594.854	19.285.543.613,56	95,82%

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.693.999.274,- (95,72%) dari target sebesar Rp.725.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.7.474.063.488,- dengan realisasi sebesar Rp.6.195.137.251,56,- (82,89%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.13.678.836.617,- dengan realisasi sebesar Rp.13.090.406.361,99 (95,70%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp.20.127.594.854,- dengan realisasi Rp.19.285.543.613,56 (95,82%). Pada tahun 2020 DPMPTSPPTK telah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Realisasi anggaran dan fisik secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN					805,408,600	800,741,002.00	99.42%	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					80,408,600	106,741,628.00	132.75%	
	Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin					80,408,600	106,741,628.00	132.75%	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					725,000,000	693,999,374.00	95.72%	
	-Retribusi IMB					725,000,000	693,999,374.00	95.72%	
	BELANJA					20,127,594,854	19,285,543,613.56	95.82%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					7,474,063,488	6,195,137,251.57	82.89%	
	Belanja Pegawai					7,474,063,488	6,195,137,251.57	82.89%	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan					5,121,150,058	3,986,796,793.00	77.85%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPDPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS					2,312,643,000	2,182,961,374.00	94.39%	
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					40,270,430	25,379,084.57	63.02%	
	BELANJA LANGSUNG					13,678,836,617	13,090,406,361.99	95.70%	
	Non Urusan								
	Penunjang Urusan Pemerintah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	900,304,000	678,364,471	75.35%	
1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah materai 3000; jumlah materai 6000; jumlah buku cek; jumlah jasa paket pengiriman	165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	100%	2,500,000	2,140,000.00	85.60%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon; rekening listrik; rekening air dan pembayaran speedy	48 rek/ 12 bulan	48 rek/ 12 bulan	100%	248,000,000	107,845,372.00	43.49%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	8 unit roda 4 & 14 unit roda 2	8 unit roda 4 & 14 unit roda 2	100%	206,750,000	159,551,549.00	77.17%	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang diadakan; jumlah petugas kebersihan	25 jenis; 2 org/ 12 bulan	25 jenis; 2 org/ 12 bulan	100%	119,910,000	118,151,000.00	98.53%	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket/12 bulan	1 paket/12 bulan	100%	10,000,000	9,733,500.00	97.34%	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	37 jenis	37 jenis	100%	21,744,000	19,456,500.00	89.48%	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak; jumlah dokumen yang digandakan; jumlah dokumen yang dijilid	8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen	8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen	100%	35,400,000	24,634,800.00	69.59%	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	11 jenis	8 jenis	73%	5,000,000	3,238,000.00	64.76%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	516 bungkus dan 720 kotak	250 bungkus dan 300 kotak	67%	20,000,000	14,360,500.00	71.80%	
10	Rapat-rapat koordinasi dan	Persentase pemenuhan rapat	90%	90%	100%	156,000,000	149,607,250.00	95.90%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPDPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	konsultasi ke luar daerah	yang diikuti/dihadiri							
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK	4 jenis	4 jenis	100%	35,000,000	29,837,000.00	85.25%	
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jml. Tenaga pengamanan kantor	7 orang	7 orang	100%	40,000,000	39,809,000.00	99.52%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	11,622,385,314	11,381,412,353	97.93%	
1	Pengadaan meubeleurnya	Jenis meubeleurnya yang diadakan	7 jenis	6 jenis	86%	491,920,000	390,661,000.00	79.42%	
2	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	100%	825,470,000	820,628,050.00	99.41%	
3	Pembangunan Kantor DPMPDPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) Lanjutan	Jumlah pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan	1 gedung	1 gedung	100%	10,294,782,656	10,169,813,469.99	98.79%	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Jml. Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%	10,212,658	309,833.00	3.03%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	100%	100%	20,400,000	19,200,000.00	94.12%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	68 stel	68 stel	100%	20,400,000	19,200,000.00	94.12%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Jumlah Investor	100	100	100%	3,825,000	3,825,000.00	100.00%	
1	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan DPMPTSPPTK	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	10 orang	3 orang	33%	3,825,000	3,825,000.00	100.00%	
	Urusan Wajib								
	Penanaman Modal								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	100	100	100%	5,774,000	5,484,150.00	94.98%	
1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	5,774,000	5,484,150.00	94.98%	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	45%	45%	100%	1,321,250	1,321,250.00	100.00%	
1	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	Jumlah calon investor yang tertarik berinvestasi; Jumlah temu	10 investor; 1 event	-	-	1,321,250	1,321,250.00	100.00%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		investasi yang diadakan							
	Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah		45%	45%	100%	7,851,290	7,851,290.00	100.00%	
1	Kajian Penanaman Modal	Jumlah kajian studi kelayakan investasi	1 dokumen	-	-	7,851,290	7,851,290.00	100.00%	
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	100	100	100%	532,578,715	491,850,103.00	92.35%	
1	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan sektor A	2500 izin; 3 orang	771 izin; 3 orang	75 %	152,159,135	149,168,398.00	98.03%	
2	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan sektor B; Jumlah tenaga honorer	1200 surat izin; 3 orang; 2 orang	535 surat izin; 3 orang; 2 orang	80%	262,425,640	241,969,730.00	92.21%	
3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses tertangani dengan baik	10 kasus	3 kasus	33%	25,914,740	24,741,875.00	95.47%	
4	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola	3 jenis	3 jenis	100%	15,254,000	12,375,800.00	81.13%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPDPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dana diverifikasi; jumlah laporan perizinan	3000 berkas izin; 12 laporan	1306 berkas izin; 12 laporan	80%	21,349,200	18,958,050.00	88.80%	
7	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jenis publikasi yang dicetak; Jumlah tayang informasi perizinan	3 jenis; 4 kali	3 jenis; 4 kali	100%	43,307,000	38,712,800.00	89.39%	
8	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Jumlah berkas perizinan yang dikelola	3000 berkas izin	1306 berkas izin	80%	6,015,000	5,103,450.00	85%	
9	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengawasan tempat usaha yang dilakukan	10 tempat usaha	-	-	6,154,000	820,000.00	13%	
	Tenaga Kerja								
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Keahlian	64%	64%	100%	112,163,750	87,273,350.00	77.81%	
1	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	16 org/9 hari	16 org/9 hari	100%	58,197,100	35,767,550.00	61%	
2	Pelatihan Tata Boga	Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang	16 orang	100%	53,481,100	51,074,400.00	95.50%	
3	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	20 orang	-	-	485,550	431,400.00	88.85%	Refocusing

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah eks siswa pelatihan yang bekerja	-	-	100%	0	-	0%	Refocusing
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan	80%	80%	100%	21,957,312.50	20,131,135.00	91.68%	
1	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Jumlah kasus PHI yang ditangani	30 kasus	30 kasus	100%	13,658,000	12,949,035.00	94.81%	
2	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah laporan asistensi dan pembinaan	10 laporan	10 laporan	100%	8,299,312.50	7,182,100.00	87%	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja	22%	22%	100%	20,868,500	19,850,150.00	95.12%	
1	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah laporan informasi pasar kerja; Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	12 laporan; 30 orang	12 laporan; 12 orang	75%	20,868,500	19,850,150.00	95.12%	
	Urusan Pilihan								
	Industri								
	Program Peningkatan	Persentase Penambahan Nilai Penjualan IKM	8%	8%	100%	404,277,485.50	348,987,664.00	86.32%	

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kemampuan Teknologi Industri								
1	Pengembangan & pelayanan teknologi industri	Jumlah sertifikasi label halal; Jumlah IKM yang difasilitasi packing; Jumlahpeserta sosialisasi packing	10 lembar; 10 IKM; 25 orang	10 lembar; 10 IKM; 25 orang	100%	22,243,000.50	22,243,000.00	100%	
2	Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Jenis alat tulis kantor UPTD yang diadakan; Jenis jasa yang dilayani; Jenis produk promosi yang dibuat; Jenis promosi yang diikuti	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event	100%	257,148,585	244,808,164.00	95.2%	
3	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	Jenis alat tulias kantor yang diadakan; jumlah promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah sncak yang diadakan	9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak	9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak	100%	124,885,900	81,936,500.00	66%	
4	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah pameran industri pangan yang diikuti; jumlah peserta bimtek standarisasi produk	-	-	-	0	-	0%	Refocusing

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2020*

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Bimbingan Teknis Standarisasi Produk	Jumlah IKM pangan yang mengikuti bimbingan teknis	-	-	-	0	-	0.00%	Refocusing
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha IKM)	17 IKM	17 IKM	100%	25,130,000	24,855,446.00	98.91%	
1	Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah	Jumlah peserta pelatihan merajut benang tingkat dasar	-	-	-	0	-	0.00%	Refocusing
2	Promosi Industri Kecil Menengah	Jumlah pameran yang diikuti IKM	-	-	-	0	-	0.00%	Refocusing
3	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah dokumen Perda RPIK	1 dokumen	1 dokumen	100%	25,130,000	24,855,446.00	98.91%	
4	Pendampingan Gugus Kendali Mutu	Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu	-	-	-	0	-	0.00%	Refocusing
	TOTAL					20,127,594,854	19,285,543,613.56	95.82%	

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan 165 buah materai 3000, 230 buah materai 6000 dan jasa pengiriman surat selama 12 bulan, untuk capaian kinerja terealisasi 100%, maka alokasi dana sebesar Rp.2.500.000,- tereliasasi Rp.2.140.000,- dengan realisasi keuangan 85,60%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rekening yang terbayar ditargetkan 48 rekening selama 12 bulan, yang merupakan rekening listrik, PDAM, telepon dan langganan speedy. Terealisasi 48 rekening selama 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.248.000.000,- terealisasi Rp.107.845.372,- dengan realisasi keuangan 43,49% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dilakukan pemeliharaan ditargetkan 8 unit roda 4 dan 14 unit roda 2 terealisasi 8 unit roda 4 dan 14 unit roda 2, maka alokasi dana sebesar Rp.206.750.000,- terealisasi Rp.159.552.549,- dengan realisasi keuangan 77,17% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang dapat dibeli ditargetkan 1 paket jasa kebersihan, 25 jenis untuk 12 bulan terealisasi 1 paket jasa kebersihan, 25 jenis untuk 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.119.910.000,- terealisasi Rp.118.151.000,- dengan realisasi keuangan 98,53% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor yang ditargetkan sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket, maka alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi Rp.9.8733.500,- dengan realisasi keuangan 97,34% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah alat tulis yang dibeli ditargetkan sebanyak 37 jenis terealisasi 37 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.21.744.000,- terealisasi Rp19.456.500,- dan realisasi 89,48% dengan realisasi fisik 100%.

- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fotocopy dan penggandaan yang dilaksanakan dengan target 8 jenis, 50896 lembar penggandaan dan 90 jilid dan terealisasi 8 jenis, 50896 fotocopy dan 80 jilid, maka alokasi dana sebesar Rp.35.400.000,- terealisasi Rp.24.634.800,- dengan realisasi keuangan 69,59% dan realisasi fisik 100%.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peralatan listrik yang terbeli dengan target 11 jenis terealisasi 8 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi Rp.3.238.000,- dengan realisasi 64,76% dan realisasi fisik 72,3%. Belum optimalnya realisasi anggaran dan fisik pada kegiatan ini disebabkan penyediaan alat listrik atau penerangan sesuai pada kebutuhan DPMPTSPPTK yang saat ini berkantor sementara pada ex. Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi.
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase rapat, tamu, lembur yang tersedia makan dan minumannya ditargetkan untuk 516 bungkus dan 720 kotak terealisasi 250 bungkus dan 300 kotak, maka alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- terealisasi Rp.14.360.500,- dengan realisasi keuangan 71,80% dan realisasi fisik 75%.
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase rapat yang diikuti/dihadiri selama 1 tahun ditargetkan 90% terealisasi 90%, maka alokasi dana sebesar Rp.156.000.000,- terealisasi Rp.149.607.250,- dengan realisasi 95,90% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK ditargetkan 4 paket terealisasi 4 paket, maka alokasi dana sebesar Rp.35.000.000,- terealisasi Rp.29.837.000,- dan realisasi keuangan 85,25% dan realisasi fisik 100%.
- 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. Indikator kegiatan ini adalah jumlah tenaga keamanan yang diadakan sebanyak 7 orang terealisasi 7 orang. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp40.000.000,-, terealisasi Rp.39.809.000,- sebesar 99,52% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Pengadaan Meubeler Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis meubeler kantor yang diadakan sebanyak 7 jenis, terealisasi 6 jenis

(97%). Dengan alokasi dana Rp.491.920.000,-, realisasi keuangan Rp.390.661.000,- sebesar 79,42%.

- 14) Pengadaan Peralatan Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis peralatan kantor yang diadakan dengan target sebanyak 4 jenis terealisasi 4 jenis, maka alokasi dana sebesar Rp.825.470.000,- terealisasi Rp.820.628.050,- dengan realisasi 99,41% dan realisasi fisik 100%.
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan dengan target sebanyak 1 gedung terpelihara terealisasi 1 gedung, maka alokasi dana sebesar Rp.10.212.658,- terealisasi Rp.309.833,- dengan realisasi fisik 100%.
- 16) Pembangunan Gedung Kantor. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) yang dibangun dengan target 1 dokumen. Terealisasi 1 dokumen. Untuk ini telah alokasi dana sebesar Rp.10.294.782.656,- dengan realisasi Rp.10.169.813.469,99. Maka realisasi keuangan sebesar 98,79% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pembangunan Gedung kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) merupakan tahap 2 yang dilaksanakan pada tahun 2020.
- 17) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian seragam yang diadakan, dengan target 68 stel telah terealisasi 100% sebanyak 68 stel. Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp20.400.000,- terealisasi 94,12% yaitu Rp.19.200.000,-.
- 18) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Investasi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, ditargetkan sebanyak 10 orang terealisasi 10 orang, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.825.000,- terealisasi Rp. 3.825.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan tingkat realisasi fisik 100%. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga dana yang tersisa merupakan diklat dalam daerah.
- 19) Promosi dan Gelar Potensi Investasi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pameran investasi yang diikuti, yang ditargetkan sebanyak 1 kali, alokasi dana sebesar Rp.1.321.250,- terealisasi Rp.

- 1.321.250,- dengan realisasi keuangan 100%. Untuk realisasi fisik tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran sehingga event promosi investasi tidak dilakukan, yang juga untuk menghindari penyebaran Covid-19.
- 20) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen peningkatan kegiatan penanaman modal dengan target 1 dokumen, maka alokasi dana sebesar Rp.5.774.000,- terealisasi Rp.5.484.150,- dengan realisasi keuangan 94,98% dan realisasi fisik 100%.
- 21) Kajian Penanaman Modal. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian studi kelayakan investasi yang disusun dengan target 1 dokumen. Alokasi dana sebesar Rp.7.851.290,- dengan terealisasi Rp. 7.851.290,- dengan tingkat realisasi 100%. Realisasi fisik berupa dokumen studi kelayakan investasi belum dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.
- 22) Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelaporan dokumentasi perizinan yang dilakukan dengan target 3000 berkas izin dan 12 laporan terealisasi 1305 berkas izin dan 12 laporan, maka alokasi dana sebesar Rp.21.349.200,- terealisasi Rp.18.958.050,- dengan realisasi keuangan 88,80% dan realisasi fisik 95%.
- 23) Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jenis izin yang dikelola secara online dalam pelayanan perizinan pada DPMPTSPPTK dengan target 3 jenis aplikasi terealisasi 3 jenis aplikasi, maka alokasi dana sebesar Rp.15.254.200,- terealisasi Rp.12.375.800,- dengan realisasi keuangan 81,13% dan realisasi fisik 100%.
- 24) Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan. Kegiatan ini memiliki indikator 3 jenis publikasi yang dicetak dan 4 kali tayang informasi perizinan terealisasi 100% dalam berbagai macam informasi terkait layanan perizinan pada DPMPTSPPTK. Untuk kegiatan ini telah alokasi anggaran Rp.43.307.000,- dengan realisasi Rp.38.712.800,-. Maka tingkat realisasi keuangan adalah 89,39%.
- 25) Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengaduan terkait izin yang telah diterbitkan, diproses dan tertangani dengan baik dengan target 30 kasus terealisasi

5 kasus, maka alokasi dana sebesar Rp.25.914.740,- terealisasi Rp.24.741.875,- dengan realisasi keuangan 95,47% dan realisasi fisik 16,7%. Tidak optimalnya capaian kinerja disebabkan pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada jumlah kasus pengaduan perizinan yang masuk ke DPMPTSPPTK selama 1 tahun.

- 26) Kegiatan Pelayanan Perizinan Sektor A. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin umum yang diterbitkan dengan target 2500 surat izin dan 3 orang FO dan BO perizinan sektor A terealisasi 770 surat izin dan 3 orang FO dan BO perizinan sektor A, maka alokasi dana sebesar Rp.152.159.135,- terealisasi Rp.149.168.398,- dan realisasi keuangan 98,03% dengan realisasi fisik 72,3%. Belum tercapainya target izin karena dipengaruhi oleh jumlah permohonan izin sektor A yang diajukan oleh masyarakat dan kebijakan PSBB pada masa pandemi Covid-19 sehingga.
- 27) Kegiatan Pelayanan Perizinan Sektor B. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah surat izin teknis yang diterbitkan dengan target 1200 surat izin dan 5 orang FO dan BO perizinan sektor B terealisasi 535 surat izin dan 5 orang FO dan BO perizinan, maka alokasi dana sebesar Rp.262.425.640,- terealisasi Rp.241.969.730,- dan tingkat realisasi anggaran 92,21% dengan realisasi fisik 95%.
- 28) Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa laporan berkas perizinan secara online sebanyak 3000 berkas izin, telah dilaksanakan sebanyak 1305 berkas izin. Untuk pelaksanaannya telah dianggarkan dana sebesar Rp.6.015.000,- dengan realisasi Rp.5.103.45,-. Maka tingkat realisasi keuangan 85% dan tingkat realisasi fisik 82,23%.
- 29) Pengawasan Tempat Usaha. Indikator kinerja kegiatan ini adalah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang belum memiliki izin usaha dengan target 30 kali terealisasi 48 kali, maka alokasi dana sebesar Rp.25.675.500,- terealisasi Rp.23.750.700,- dan realisasi 92,50% dengan realisasi fisik 160%.
- 30) Pelatihan Kewirausahaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dengan target 16 orang selama 9 hari, telah terealisasi dalam pelaksanaannya 16 orang selama 9 hari. Maka alokasi dana sebesar Rp.54.885.900,- terealisasi Rp.36.202.900,- dan

tingkat realisasi keuangan 66% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran pada kegiatan ini merupakan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan, karena peserta telah memperoleh pekerjaan sehingga tidak perlu melakukan magang.

- 31) Pelatihan Tata Boga. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan bed cover sebanyak 16 orang. Telah terealisasi sebanyak 16 orang untuk dalam pelaksanaan kegiatan. Maka alokasi dana sebesar Rp.85.277.660,- terealisasi Rp.80.599.250,- dan tingkat realisasi keuangan 94,51% dengan realisasi fisik 100%.
- 32) Pelatihan Monev Eks Siswa Pelatihan. Tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing anggaran.
- 33) Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta. Tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing anggaran.
- 34) Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja. Indikator kinerja kegiatan Pelayanan dan Penempatan tenaga Kerja adalah jumlah laporan penempatan tenaga kerja sebanyak 12 laporan selama 1 tahun, maka alokasi dana sebesar Rp.13.685.290,- terealisasi sebesar Rp.12.410.800,- dengan tingkat realisasi fisik 100% dan tingkat realisasi keuangan 80,96%.
- 35) Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Indikator kinerja kegiatan ini adalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diproses dengan target sebanyak 30 kasus tercapai 13 kasus. Maka alokasi dana sebesar Rp.13.658.000,- dan realisasi Rp.12.949.035,- dengan tingkat realisasi fisik 120% dan realisasi keuangan 93,98%. Tingginya tingkat realisasi fisik karena pelaksanaan kegiatan ini bergantung pada kasus PHI yang terselesaikan.
- 36) Asistensi dan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Indikator kinerja kegiatan ini adalah laporan asistensi dan pembinaan penyusunan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan target kinerja 12 laporan dan tercapai 12 laporan pembinaan. Maka alokasi dana sebesar Rp.8.299.312,- dan realisasi Rp.7.182.100,- (87%) dengan tingkat realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan asistensi pada perusahaan dapat berupa permintaan dari perusahaan dan turun ke lapangan.

- 37) Fasilitas bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat fasilitas dalam pemanfaatan sumber daya produksi yaitu peserta pelatihan border tingkat mahir, pesertanya berasal dari IKM dengan target 20 orang terealisasi 20 orang, maka alokasi dana sebesar Rp.19.864.500,- terealisasi Rp.16.916.150,- dan tingkat realisasi keuangan 85,16% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 38) Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta magang membuat sebanyak 5 orang; jumlah IKM yang mengikuti bimtek AMT sebanyak 20 orang dan jumlah pameran yang diikuti sebanyak 2 event. Maka alokasi dana sebesar Rp.298.000.000,- terealisasi Rp.294.332.479,- dan tingkat realisasi keuangan 98,77% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 39) Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen RPIK Bukittinggi yang disusun, sebagai pedoman dalam pengembangan industri kecil menengah di Kota Bukittinggi, ditarget sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen naskah akademik RPIK yang akan diperdakan pada tahun 2020. Maka alokasi dana Rp.209.420.000,- terealisasi Rp.197.917.050,- dan tingkat realisasi keuangan 94,51% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 40) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi sebanyak 25 orang; jumlah IKM yang difasilitasi label halal sebanyak 5 IKM dan jumlah IKM yang difasilitasi packing sebanyak 5 IKM terealisasi 25 IKM peserta sosialisasi dan 5 IKM yang difasilitasi packing serta 5 IKM yang difasilitasi label halal maka alokasi dana sebesar Rp.39.450.000,- terealisasi Rp.39.121.500,- dan tingkat realisasi keuangan 99% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 41) Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemenuhan penyelenggaraan operasional UPTD Kerajinan Industri dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan, maka alokasi dana sebesar Rp.150.531.200,- terealisasi Rp.144.722.370,- dan tingkat realisasi keuangan 96,1% dengan tingkat realisasi fisik 100%.

- 42) Pelatihan Rendo Koto Gadang. Kegiatan ini memiliki indikator jumlah peserta pelatihan kerajinan bambu yang ditargetkan sebanyak 20 orang. Dalam pelaksanaan pelatihan ini telah terealisasi 20 orang. Kegiatan ini alokasi dana Rp.68.742.600,- dengan realisasi Rp.60.798.500,-. Maka realisasi keuangan 88,01% dan fisik 100%.
- 43) Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri. Kegiatan ini memiliki indikator yaitu jumlah organisasi mitra kerja UPTD Kerajinan Industri yang difasilitasi sebanyak 1 organisasi Dekranasda, tercapai sebanyak 1 organisasi. Maka alokasi dana sebesar Rp.248.680.000,- terealisasi sebanyak Rp. 238.352.054,-, dengan tingkat realisasi keuangan 95,85% dan tingkat realisasi fisik 100%.
- 44) Penumbuhan Sentra Potensial. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah IKM yang mengikuti pameran hasil sentra target sebanyak 5 IKM, jumlah pameran yang diikuti target sebanyak 1 pameran, dan lamanya pelaksanaan pameran. Realisasi capaian target fisik sebanyak 5 IKM yang mengikuti pameran, 1 pameran yang diikuti selama 5 hari. Maka alokasi dana Rp.85.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.159.239,- dan tingkat realisasi keuangan mencapai angka 99,9% dengan tingkat realisasi fisik 100%.
- 45) Perkuatan Asosiasi Makanan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah asosiasi pangan yang dibina sebanyak 1 asosiasi dan jumlah pameran pangan yang diikuti dengan target 1 pameran. Realisasi fisik yaitu 1 asosiasi pangan yang dibina dan 1 pameran pangan yang diikuti. Maka alokasi dana sebesar Rp.50.780.000,- terealisasi Rp.47.183.512,-, dengan tingkat realisasi keuangan 92,9% dan tingkat realisasi fisik 100%.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan LKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai pengelola urusan penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam urusan penanaman modal bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan perindustrian dan pelayanan serta penempatan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Dengan memperhatikan capaian kinerja di Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mencapai 95,82% dengan predikat “Sangat Tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

4.2 SARAN

Dengan adanya Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Bukittinggi, Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi



ISRA YONZA, SH, MH

NIP. 19710719 200212 1 003